

# ANALISIS SEJARAH

Diterbitkan Labor Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas



**Kecewa Dan Memberontak: Aceh Dan Sumatera Barat Dalam  
Perubahan Politik Kontemporer : 82-90**  
Syafrizal

**Kerajaan-Kerajaan Sapih Balahan, Kuduang Karatan- Kapak Radai- Timbang Pacahan  
Kerajaan Pagaruyung Abad Ke-20: 91-111**  
Mhd Nur

**Pemerintahan Tradisional Di Dataran Tinggi Karo  
Masa Pemerintahan Kolonial Belanda: 112-119**  
Irianna

**Perkembangan Pola Pendidikan Silat Pauh  
Di Perguruan Silat Singo Barantai Tahun 1960-2012 : 120-131**  
Irwandi


**Jeratan Kaki Transmigran Jawa: Studi Kasus Trans-Migran Lunang Silaut  
Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat : 132-145**  
Eni May, Zaiyardam Zubir, Fajri Rahman

**Jalan Terjal Membentuk Karakter Bangsa: Dialektika Petani Versus Pengusaha Dan Penguasa  
Di Sumatera Barat, Riau Dan Jambi 1970-2010 : 146-157**  
Sabar, Linda Yanti, Zaiyardam Zubir

**Manalufauri: Antara Tradisi Dan Kebutuhan Dalam Masyarakat Nias Di Labuah Gunuang : 158-168**  
Nahdatul Hazmi

**Keruntuhan Peradaban Barat Menurut Oswald Spengler : 169-185**  
Purwo Husodo

**Penerapan Teknologi Rel Kereta Api Di Sumatera Barat : 186-200**  
Aulia Rahman

 <b>AS Unand</b>	<b>Volume/No</b>	<b>Halaman</b>	<b>Tahun</b>	<b>ISSN</b>
	<b>6/2</b>	<b>82-200</b>	<b>2017</b>	<b>2087- 5010</b>

# ANALISIS SEJARAH

Diterbitkan Labor Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

**Penanggung Jawab** : Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas,  
Ketua Laboratorium Sejarah Universitas Andalas

**Mitra Bestari** : Prof. Dr. Mestika Zed (Universitas Negeri Padang)  
Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan (Universitas Andalas)

**Editor Ahli** : Dr. Suribidari MA (LIPI)  
Dr. Anatona, M.Hum (Universitas Andalas)  
Dr. Wannofri Samry, M. Hum (Universitas Andalas)  
Drs. Sabar, M.Hum  
Hari Efendi, S.S, M.A

**Pimpinan Redaksi** : Yudhi Adoni, M.Hum  
**Sekretaris Pelaksana** : Israr Iskandar, S.S., M.Si

Ana Fitri Ramadhani SS, MA  
Aulia Rahman, S. Hum

Para editor mengundang para penyumbang tulisan untuk mengirimkan naskah hasil penelitian sejarah serius. Naskah dengan metodologi, perspektif, dan topik terbaru akan diberi perhatian serius

Alamat :  
Labor Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas  
Kampus Unand Limau Manis  
T/F/ 0751-71227  
Website : [jas.fib.unand.ac.id](http://jas.fib.unand.ac.id)  
E-mail : [analisissejarah@fib.unand.ac.id](mailto:analisissejarah@fib.unand.ac.id)

---

## **KECEWA DAN MEMBERONTAK: ACEH DAN SUMATERA BARAT DALAM PERUBAHAN POLITIK KONTEMPORER**

**Syafrizal**

Staff Pengajar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Indonesia  
Email : [syafrizalsirin@yahoo.co.id](mailto:syafrizalsirin@yahoo.co.id)

---

### **Abstrak**

Tulisan ini membicarakan dinamika masyarakat Aceh dan Sumatera Barat dalam menghadapi perubahan politik kontemporer. Perjalanan masa lampau masyarakat pada kedua daerah yang sama-sama terletak di kawasan pantai barat Sumatera itu, memperlihatkan fenomena yang hampir sama. Kedua daerah itu sama-sama memainkan peranan sebagai benteng RI yang sangat tangguh selama perang kemerdekaan. Belanda tidak berhasil memasuki wilayah Aceh, sedangkan Sumatera Barat menjadi markas PDRI ketika pemerintah pusat tidak dapat menjalankan tugasnya akibat Agresi Militer Belanda II.

Setelah perjuangan kemerdekaan berakhir, masyarakat Aceh dan Sumatera Barat juga sama-sama kecewa terhadap pemerintah pusat. Aceh kecewa karena janji pemerintah pusat untuk memberikan otonomi khusus berbasis Syariat Islam, ternyata tidak jadi terwujud. Malahan Aceh diintegrasikan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, yang penduduknya juga banyak yang beragama Kristen. Sementara itu di Sumatera Barat, pemberhentian sebagian prajurit Divisi Banteng dan jwanisasi birokrasi telah menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pusat. Kedua kekecewaan itu berlanjut menjadi pemberontakan daerah melawan pemerintah pusat. Kedua pemberontakan itu akhirnya berhasil dipadamkan pemerintah RI.

Kata Kunci : pergolakan daerah,

## I. Pengantar

Pengalaman masyarakat Aceh, dan Minangkabau yang mendiami kawasan Pantai Barat Sumatera menarik dibicarakan. Kedua wilayah itu memperlihatkan kecenderungan yang hampir sama dalam fenomena perubahan politik kontemporer di Indonesia. Beberapa saat setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pemimpin masyarakat di Aceh dan Sumatera Barat sama-sama menyatakan dukungannya terhadap Re-publik Indonesia (RI). Kedua wilayah itu malahan muncul menjadi benteng pertahanan RI yang tangguh menghadapi bekas kolonialis Belanda. Pada akhir tahun 1949 pemerintahan Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Memasuki dekade 1950-an elit politik dan masyarakat di Aceh dan Sumatera Barat sama-sama kecewa terhadap pemerintah pusat, lalu akhirnya juga sama-sama melakukan pemberontakan.

Tulisan ini membicarakan soal terdapatnya kecenderungan yang hampir sama dalam dinamika masyarakat Aceh, dan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menghadapi perubahan politik kontemporer. Persoalan yang dibicarakan meliputi faktor kesuksesan masyarakat Aceh dan Sumatera Barat, dalam perang mempertahankan *kemerdekaan Indonesia* Lalu faktor penyebab kecewanya masyarakat kedua wilayah itu terhadap pemerintah pusat RI pada awal dekade 1950-an. Kekecewaan masyarakat tersebut akhirnya berkembang menjadi pemberontakan melawan pemerintah pusat.

## II. Aceh dan Sumatera Barat dalam Revolusi Kemerdekaan

Melalui perang kolonial selama lebih kurang 30 tahun, akhirnya pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai wilayah Aceh pada awal dekade kedua abad ke-20. Sebelum berlangsungnya penjajahan Belanda di Aceh terdapat dua jenis elit sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu ulama (bergelar teungku), dan bangsawan tradisional atau kaum *ukebalog* yang bergelar teuku.<sup>1</sup> Hubungan kedua kelompok elit sosial itu pada mulanya bersifat harmonis, ulama mengurus persoalan agama, sedangkan *ukebalog* mengurus adat dan pemerintahan.

Keharmonisan hubungan sosial antara ulama dan *ukebalog* dirusak oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pendekatan dan bujukan yang dilakukan Belanda membuat sebagian *ukebalog* mendekati kepada Belanda, fenomena itu terlihat terutama saat perlawanan rakyat Aceh mendekati tahap akhir pada awal abad ke-20.<sup>2</sup> Ulama terus memimpin perlawanan rakyat Aceh, mereka membara semangat rakyat dengan menggelorakan ideologi Perang Sabil.<sup>3</sup>

Perang Aceh akhirnya berhasil dipadamkan Belanda pada awal tahun 1910-an

1 Teuku Syamsuddin, "Kebudayaan Aceh", dalam Koentjaraningrat, ed., *Manisa dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 234-235.

2 Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hal. 192-196.

3 Membaca dan mendengarkan hikayat tentang Perang Sabil merupakan hiburan bagi rakyat Aceh ketika itu. Urutan tentang Hikayat Perang Sabil dapat ditelusuri dalam *ibid.*, hal. 105-143.

dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari Negara Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda merekrut kalangan *uleebalang* sebagai tenaga administrasi, dan menempati jabatan birokrasi tingkat bawah.<sup>3</sup> *Uleebalang* menjadi mitra dan sekaligus ujung tombak pemerintah kolonial di Aceh. Ulama muak dengan *uleebalang* yang telah memerankan dirinya sebagai kaki-tangan pemerintahan kafir.

Ulama di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh, menyatukan diri dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939. Selama era pendudukan Jepang ulama PUSA disertai tugas mengurus peradilan agama, dan kedudukan administrasi pemerintahan tetap berada di tangan kelompok *Uleebalang*.<sup>4</sup> Kebencian ulama dan sebagian besar rakyat Aceh kembali tertumpah kepada *uleebalang*, hal itu terkait dengan ketidakberesan *uleebalang* dalam menangani *romosho* (kerja paksa) dan penyeteroran padi untuk gancang-gancang logistik tentara Jepang.

Selain itu sebagian ulama juga dendam terhadap *uleebalang*, karena pengaduan yang dilakukan *uleebalang* telah mengakibatkan beberapa orang tokoh PUSA ditangkap dan disiksa Jepang.<sup>5</sup> Kebencian dan dendam ulama terhadap *uleebalang*, mendorong ulama melakukan inisiatif yaitu bertindak cepat mendukung kemerdekaan RI yang baru saja

diproklamasikan. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, ulama Aceh ~~menyambut~~ keselamatan dirinya dengan ~~menyambut~~ RI. Kekalahan RI berarti membuka kesempatan kembali bagi Belanda untuk mengukuhkan kekuasaan *Uleebalang*.<sup>6</sup>

Kantor-kantor pemerintahan di Aceh pada awal kemerdekaan masih dikuasai oleh kelompok *uleebalang*, namun sejak bulan Oktober 1945 ulama Pusa di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh mengambil alih kantor-kantor pemerintahan.<sup>7</sup>

Kemudian ulama segera membentuk Lasykar Mujahidin, dan melakukan "sweeping" terhadap *uleebalang*. Perang Jihad telah menghancurkan *uleebalang* dan menyingkirkannya dari kehidupan masyarakat. Dari bulan Oktober 1945 sampai dengan awal tahun 1946 terjadi revolusi sosial di Aceh, yang mengkhawatirkan relatif banyak *uleebalang* yang ditangkap dan dibunuh oleh kalangan PUSA, harta mereka juga dirampas.<sup>8</sup>

Ulama PUSA sukses memimpin jalannya revolusi mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh. Selama masa Perang Kemerdekaan (1945-1949) Belanda tidak berhasil menguasai wilayah Aceh.

Berbeda dengan Aceh, maka Sumatera Barat merupakan satu-satunya wilayah di luar Pulau Jawa yang paling aktif dalam era pergerakan nasional. Muhammadiyah yang merupakan organisasi sosial keagamaan berahlan Islam reformis dan bersifat nasional misalnya terbentuk di Yogyakarta pada akhir

3 Eric Morris, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam", dalam Audrey R. Kahin, ed., *Pegokohan Darah Padi Awal Kemerdekaan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 89-92.

4 *Ibid.*, hal. 94-96.

5 Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 180.

6 Nazaruddin Sjamsuddin, *Pembebasan Kami Republik: Kisah Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 2-3.

7 Eric Morris, *op.cit.*, hal. 96-97.

8 *Ibid.*, hal. 100-106.

tahun 1912, ternyata berkembang pesat di Sumatera Barat sejak pertengahan tahun 1925.<sup>9</sup> Tokoh dan kader Muhammadiyah di Sumatera Barat terlibat dalam gerakan politik menentang Belanda. Mereka menggerakkan ulama dan guru-guru agama di Sumatera Barat, untuk menghadiri rapat umum di Bukittinggi pada tanggal 19 Agustus 1928, guna menolak pemberlakuan Ordonansi Guru.<sup>10</sup> Ordonansi yang menghambat kebebasan guru-guru agama dalam memberikan pelajaran di sekolah tidak jadi diberlakukan di Sumatera Barat.

Dalam waktu yang hampir bersamaan di Sumatera Barat terbentuk pula berbagai cabang Sarekat Rakyat (Serikat Islam Merah), yang pusatnya berada di Pulau Jawa. Sarekat Rakyat dipengaruhi oleh ajaran komunisme, namun bukanlah komunisme sekuler melainkan ajaran komunisme yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW guna menghadapi penjajahan Belanda.<sup>11</sup> Cabang Sarekat Rakyat di Silungkang (dekat Kota Sawahlunto) memotori Pemberontakan Komunis di Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 1927.<sup>12</sup> Pemberontakan Komunis dalam waktu

yang bersamaan juga terjadi di Banten (Jawa Barat).

Partai politik Islam yang bersifat radikal dan non-kooperasi dalam berhadapan dengan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) berdiri di Sumatera Barat pada tahun 1930.<sup>13</sup> Kegiatan Partai PERMI dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda, karena dapat membakar semangat nasionalisme di kalangan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. Pemimpin PERMI seperti Ilyas Yakub dan Muchtar Lutfi ditangkap, PERMI dilarang melakukan kegiatan politik, dan akhirnya membubarkan diri pada tahun 1936.<sup>14</sup>

Dari beberapa fenomena itu, terlihat adanya integrasi yang kuat antara masyarakat di Sumatera Barat dengan Jawa dalam aktivitas pergerakan nasional. Perantau intelektual dari Sumatera Barat (Ranah Minangkabau) yang bermukim di Jawa, juga muncul menjadi elit nasionalis Indonesia. Dalam hal ini amat tepat pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Mochtar Naim bahwa pada masa pergerakan nasional terdapat konfigurasi kepemimpinan dari suku Jawa dan Minangkabau.<sup>15</sup> Semangat anti Belanda semakin berkembang pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat.

Tidaklah mengherankan kalau kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, cepat diresponi oleh masyarakat Sumatera Barat. Balai Penerangan

---

9Perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat antara lain disinggung dalam Burhanuddin Daya, *Gerakan Pergerakan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hal. 329-330.

10Rapat umum itu dihadiri oleh sekitar 800 orang ulama dan guru agama, juga dihadiri petugas Belanda Dr. De Vries (dari Kantor Urusan Bumiputera). Uraian lebih lengkap dapat diikuti dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1991), 197-198.

11Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hal. 57-58.

12Ibid., hal. 125-131.

13Proses terbentuknya Partai Permi dapat ditelusuri dalam Burhanuddin Daya, op.cit., hal. 265-270.

14Ibid., hal. 275-276.

15Mochtar Naim "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara", dalam A.A. Navis, ed., *Dialektika Minangkabau dalam Kerangka Sosial dan Politik* (Padang: Genta Singgalang Press, 1983), 64-66.

Pemuda Indonesia (BPPI) di Padang, dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Bukittinggi didirikan pada minggu terakhir bulan Agustus 1945.<sup>16</sup> Kedua organisasi pemuda itu melakukan sosialisasi tentang kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat sampai ke kampung-kampung, dan mempraktikkan pengibaran Bendera Merah Putih guna membakar semangat revolusioner masyarakat.

Semangat revolusioner anti penjajahan Belanda telah meluas di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyulitkan Belanda menguasai Sumatera Barat selepas Perang Dunia II. Selain itu, elit sosial dan politik di Sumatera Barat cepat melakukan konsolidasi terhadap masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan. Tentara bekas didikan Jepang dalam *Gyugun*, diorganisir menjadi inti kekuatan tentara perjuangan menghadapi Belanda. Beberapa saat setelah diumumkan-nya Maklumat Pemerintah No. X pada tanggal 3 November 1945, yang menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk membentuk partai-partai politik, di Sumatera Barat segera terbentuk tujuh buah partai politik. Partai-partai dimaksud adalah Masyumi, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), PKI Lokal Islami, dan Majelis Tinggi Kerapat Adat Alam Minangkabau (MTKAAM).<sup>17</sup>

Pembentukan partai-partai politik itu ditujukan untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepemimpinan partai-partai itu semuanya berada di tangan elit nasionalis, yang umumnya juga telah berkiprah dalam era kebangkitan nasional. Keberadaan partai-partai politik itu dilengkapi pula dengan pembentukan lasykar rakyat seperti Lasykar Sabillillah milik Masyumi, dan Lasykar Muslimin Indonesia milik Perti.<sup>18</sup> Sedangkan kalangan pemuda yang tidak tergabung dalam tentara reguler dan lasykar atau barisan rakyat, diorganisir ke dalam Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK). Selama berlangsungnya perang kemerdekaan di Sumatera Barat, BPNK telah memainkan peranan sebagai penjaga keamanan nagari, membantu tentara, memata-matai musuh, dan membantu penyediaan kebutuhan logistik untuk dapur umum.<sup>19</sup>

Dari serangkaian fenomena revolusi tersebut, rasanya kelompok pendukung kembalinya penjajahan Belanda sulit berkembang di Sumatera Barat. Dalam konteks itulah bisa dipahami kalau Negara Boneka bilangan Belanda tidak pernah terwujud di Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat selama perang kemerdekaan malahan muncul menjadi benteng pertahanan RI yang sangat tangguh, yaitu sebagai markas Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

---

16. Ahmad Husein, et al., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau Riau 1945-1950* (Jakarta: BPSIM, 1991), hal. 99-101.

17. Kementerian Penerangan, *Proyeksi Sumatera Tengah* (Jakarta: Kempen RI, 1953), hal. 459-464.

---

18. Audrey R. Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950* (Padang: MSI Sumatera Barat, 1997), hal. 169-170.

19. *Ibid.*, hal. 233.

### III. Munculnya Kekecewaan

Kehadiran PDRI di Sumatera Barat telah berhasil menyelamatkan Negara RI dari kehancuran, meskipun Belanda dapat menguasai Ibukota RI di Yogyakarta, dan menangkap Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan RI pada akhir tahun 1949. Merupakan dekade 1950-an, masyarakat Aceh dan Sumatera Barat yang berperan penting dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, merasa kecewa atas kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah mereka.

Ketika dalam suasana perang kemerdekaan, Presiden Soekarno pernah berkunjung ke Aceh. Teungku Daud Beureueh yang menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, memenuhi ajakan Presiden Soekarno untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan. Bersama dengan itu Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh meminta kepada Presiden Soekarno, agar setelah perang kemerdekaan berakhir rakyat Aceh diberikan status otonomi khusus untuk menjalankan syariat agama.<sup>20</sup> Presiden Soekarno di hadapan ulama Aceh pada tahun 1948 berjanji akan berusaha menjadikan Aceh sebagai daerah Islam.<sup>21</sup> Janji Presiden RI itu antara lain memotivasi Teungku Daud Beureueh, dan ulama Aceh menjadikan revolusi sebagai perang berlandaskan agama.

Setelah berakhirnya perang kemerdekaan, pemerintah RI membubarkan daerah-daerah militer termasuk Wilayah Gubernuran Militer Aceh. Kemudian

struktur pemerintahan daerah ditata ulang, dan dalam konteks itulah ulama dan sebagian besar rakyat Aceh kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat, karena jangankan mendapatkan otonomi khusus, malahan daerah Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Aceh dijadikan sebagai sebuah keresidenan, jabatan residen ditempati oleh R.M. Danubroto dari etnis Jawa, sementara ulama-ulama PUSA pada mulanya masih dipercaya menempati jabatan bupati, camat sampai kepala desa.<sup>22</sup> Kemudian secara bertahap dilakukan mutasi oleh pemerintah pusat dan daerah, 2 patih Aceh dipindahkan ke Sumatera Timur dan Tapanuli, digantikan oleh birokrat dari etnis Jawa dan Batak beragama Kristen.<sup>23</sup> Ulama PUSA akhirnya secara pelan-pelan tapi pasti telah tersingkir dari panggung pemerintahan negara RI yang diperjuangkannya. Fenomena itu tentu saja sangat mengecewakan ulama-ulama PUSA dan sebagian besar rakyat Aceh.

Perubahan di bidang militer juga menimbulkan kekecewaan yang hampir sama. Divisi tentara di Aceh yang sukses dalam perang kemerdekaan, dibentuk menjadi sebuah brigade sehingga banyak prajurit yang diberhentikan dari dinas militer. Beberapa batalyon yang tinggal malahan pada tahun 1950-1951 dipindahkan pula ke Sulawesi Selatan dan Maluku.<sup>24</sup> Kemudian digantikan oleh unit-unit pasukan dari Tapanuli. Kekecewaan tersebut mencapai

20 Taufik Abdullah, *op.cit.*, 181-184.

21 Nizaruddin Sjamsuddin, *op.cit.*, hal. 31-33.

22 *Ibid.*, hal. 54-56.

23 *Ibid.*, hal. 56.

24 *Ibid.*, hal. 56-57.



puncaknya, yaitu pada tanggal 21 September 1953 di saat pejabat-pejabat teras Aceh sedang berada di Medan menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional oleh Presiden Soekarno. Teungku Daud Beureueh mengumumkan terbentuknya Negara Islam Indonesia Aceh, kantor-kantor pemerintahan diambil alih, pos-pos polisi dan tentara diserang.<sup>25</sup>

Pemberontakan Aceh pada mulanya dihadapi pemerintah dengan jalan kekerasan, yaitu dengan mengirim unit-unit pasukan tentara dan puluhan kompi Britmob. Pemerintah mengalami kesulitan menghentikan Pemberontakan Aceh. Daud Beureueh dan ulama PUSA berhasil mengintensifkan dendam dan kekecewaan rakyat Aceh melalui ideologisasi agama, yang telah dilakukan sejak tahun 1952 dalam khotbah dan tabligh agama.<sup>26</sup> Jalur non-militer akhirnya dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu memberikan status provinsi tersendiri bagi Aceh pada tahun 1957, dan Ali Hasjmy (tokoh muda PUSA) dilantik menjadi Gubernur Aceh yang pertama.<sup>27</sup> Teungku Daud Beureueh melunak, dan akhirnya menghentikan perlawanan.

Setelah perang kemerdekaan berakhir, permuka masyarakat di Sumatera Barat juga mengalami kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan pertama berhubungan dengan militer, Divisi III Banteng/Sumatera Tengah diciutkan menjadi sebuah brigade sehingga jumlah batalyon secara otomatis berkurang. Sebagian prajurit terpaksa

diberhentikan, seakan jasa mereka terdupakan bagaikan habis manis sepah dibuang.<sup>28</sup> Belum sembuh luka lama, muncul pula luka baru yaitu pemerintah pusat mengangkat seorang birokrat dari Jawa, yaitu Ruslan Muljohardjo, menjadi Gubernur Sumatera Tengah (berpusat di Bukittinggi) menggantikan Mr. Nasroen.<sup>29</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) yang didominasi oleh etnis Minangkabau menolak pengangkatan Ruslan Muljohardjo itu. DPRST telah memilih empat nama calon untuk menggantikan posisi Mr. Nasroen yaitu Ilyas Yakub, Sutan Mohammad Rasjid, Mohammad Djamil, dan A.Rahim Usman.<sup>30</sup> Pemerintah ternyata tetap bertahan untuk mengangkat Ruslan Muljohardjo menjadi Gubernur Sumatera Tengah, dan DPRST yang membangkang akhirnya dibekukan pemerintah pusat.

Ketika Ruslan Muljohardjo menjadi Gubernur Sumatera Tengah sejak tahun 1951, hubungan Jawa-Sumatera Tengah makin memanas terutama ketika Muhadi (dari etnis Jawa) diangkat sebagai Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sumatera Tengah.<sup>31</sup> Kekecewaan masyarakat Sumatera Barat terhadap kebijakan pemerintah pusat itu

<sup>25</sup>Ibid, hal. 83-86

<sup>26</sup>Ibid, hal. 90-91

<sup>27</sup>Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 112-113

<sup>28</sup>R. L. Leirissa, *PRRI Peristiwa Strategi Membangun Indonesia Tanpa Koneksi* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 35-37

<sup>29</sup>Kementerian Penerangan RI, op.cit, hal. 312-313

<sup>30</sup>Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dan VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal. 162

<sup>31</sup>Gusti Asnan, "Pengantar Diskursus Intelektual Orang Minangkabau Tahun 1950-an", dalam Gusti Asnan, ed., *Perubahan, Otoriter, dan Gerakan Daerah: Perikiran Politik Orang Minangkabau Tahun 1950-an* (Padang: Citra Budaya, 2006), hal. xvii-xviii

mewarnai suasana reuni eks anggota Divisi Banteng di Padang pada tanggal 21-24 November 1956.<sup>32</sup> Dari reuni itulah terbentuk Dewan Banteng, diketuai oleh Letkol Ahmad Husein, yang ditugaskan untuk mewujudkan aspirasi yang mengemuka dalam reuni seperti menghapuskan sentralisasi birokrasi, otonomi, dan pemberian tunjangan bagi janda dan bekas anggota tentara.<sup>33</sup>

Wilayah Sumatera Tengah (terutama Sumatera Barat) merupakan basis Masyumi dalam Pemilihan Umum 1955. Pimpinan Pusat Masyumi mendukung tuntutan dan perjuangan Dewan Banteng. Beberapa orang tokoh penting Masyumi seperti Mohammad Natsir, Mr. Buchanuddin Harahap, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara hijrah ke Sumatera Tengah. Mereka bergabung dengan perwira-perwira daerah bergolak untuk menekan pemerintah pusat. Situasi politik di Sumatera Tengah akhirnya berkembang menjadi Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) sejak awal tahun 1958, yang berpusat di Sumatera Barat.

Kekuatan militer digunakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk menumpas Pemberontakan PRRI. Pada pertengahan tahun 1958, semua kota-kota pusat pemerintahan di Sumatera Barat berhasil diduduki tentara pusat, pimpinan dan pengikut PRRI melakukan gerilya di wilayah pedalaman. Akhirnya dalam tahun 1961 petlawanan PRRI berhasil ditumpuhkan pemerintah.

#### IV. Kesimpulan

Perubahan politik kontemporer di Indonesia, telah memunculkan kekecewaan sebagian besar masyarakat di Aceh dan Sumatera Barat. Kedua daerah itu sama-sama merupakan benteng RI yang sangat tangguh selama perang kemerdekaan, akhirnya setelah perjuangan berakhir mereka sama-sama kecewa terhadap pemerintah pusat, dan berujung pada pemberontakan. Setelah kedua daerah itu berhasil diamankan, perlakuan pemerintah terhadap tokoh pemberontakan dari masing-masing daerah amat berbeda satu sama lain.

Pemimpin pemberontakan Aceh Teungku Daud Beureueh dijemput dengan konvoi mobil oleh pejabat teras dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Ia dijemput ke Aceh Timur pada tanggal 18 Mei 1962, dan dibawa ke Kutaraja.<sup>34</sup> Teungku Daud Beureueh menolak tinggal di rumah yang disediakan petinggi militer Aceh di Kutaraja. Dalam rangka memenangkan Golkar pada Pemilihan Umum 1971, yang merupakan pemilihan umum pertama masa Orde Baru, Teungku Daud Beureueh dijemput aparat pemerintahan. Ia diboyong ke Jawa dan diajak melakukan tamasya ke Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah.<sup>35</sup>

Perlakuan berbeda dibentkan kepada tokoh-tokoh PRRI. Mohammad Natsir, Mr. Buchanuddin Harahap, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara ditahan oleh pemerintahan Soekarno. Mereka akhirnya dibebaskan oleh rezim Orde Baru namun dilarang melakukan

---

32R. L. Lirissa, op.cit., hal. 37-38.  
33Ibid., hal. 39-41.

34Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan...*, op.cit., hal. 333.

35Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi...*, op.cit., hal. 86-87.

kegiatan-kegiatan politik. Sementara Ahmad Husein dipecat dari dinas kemiliteran, dan memasuki rumah tahanan. Meskipun rezim Orde Baru telah membebaskannya dari tahanan, namun gerak-geriknya tetap diwaspadai.

[\*]

#### DAFTAR BACAAN

- Ahmad Husein, et al., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau Riau 1945-1950*. Jakarta: BPSIM, 1991.
- Audrey R.Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Padang: MSI Sumatera Barat, 1997.
- Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Eric Morris, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam", dalam Audrey R. Kahin, ed., *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Gusti Asnan, "Pengantar: Diskurs Intelektual Orang Minangkabau Tahun 1950-an", dalam Gusti Asnan, ed., *Demokrasi, Otonomi, dan Gerakan Daerah: Pemikiran Politik Orang Minangkabau Tahun 1950-an*. Padang: Citra Budaya, 2006.
- Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat: Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.
- Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah*. Djakarta: Kempen RI, 1953.
- Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.
- Mochtar Naim, "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara", dalam A.A.Navis, ed., *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press, 1983.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Payung Bangun, *Kolonel Maludin Simbolon: Liku-Liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- R. Z. Leirissa, *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Teuku Syamsuddin, "Kebudayaan Aceh", dalam Koentjaraningrat, ed., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.